



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOEDONO MADIUN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMMAD SUCAHYONO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR
3. NHK : 639539

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.170.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 220.800.000
5. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
6. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 111.600.000
7. Tanah Seluas 3455 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 380.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 207.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	933.035.737
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.410.485.737

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.410.485.737

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.